

DETERMINAN TINGKAT PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI BERBAGAI JENJANG SEKOLAH

Rambat Nur Sasongko

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu

e-mail: rambatnur@yahoo.com

Abstract: this study aims to describe the determinants of the level of NES implementation at various levels of school. The research method uses descriptive studies. The research subjects were principals, teachers, administrative staff, school committees, and support staff in elementary, junior high, high school and vocational schools in the Lubuklinggau region, Musi Rawas, and North Musi Rawas. Data collection techniques are collected by interviews, observation, and documentation studies. Techniques for analyzing data with “descriptive statistics” and “flow analysis” on an ongoing basis. The results of the study show that the application of SNP at various levels of the school has different achievements from one school to another. It really depends on the resources and potential of the school that is owned. In general, almost all schools have not been able to apply the NES effectively. This is determined by two main factors, namely internal factors and external factors. Internal factors such as concern for school residents, availability of resources, and availability of budgets. External factors such as the support of school committees, parents, communities, government, and donors.

Keywords: National Education Standards, determinants, various schools

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan determinan tingkat penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah. Metode penelitian menggunakan studi deskriptif. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, dan tenaga pendukung di SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Teknik pengumpulan data dihimpun dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan “statistic deskriptif” dan “flow analysis” secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah memiliki capaian yang berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu amat tergantung dari sumber daya dan potensi sekolah yang dimiliki. Pada umumnya hampir semua sekolah belum mampu menerapkan SNP dengan efektif. Hal itu ditentukan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kepedulian warga sekolah, ketersediaan sumber daya, dan ketersediaan anggaran. Faktor eksternal seperti dukungan komite sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan donator.

Kata kunci: Standar Nasional Pendidikan, determinan, berbagai jenjang sekolah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sekolah dapat dilakukan secara efektif, jika dilakukan dengan berpedoman kepada standar yang ditetapkan. Standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di era reformasi diupayakan meningkat terus melalui penetapan undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan peruntukannya. Misalnya telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berfungsi sebagai standar dalam menyelenggarakan pendidikan. SNP ini pun juga telah disempurnakan dan direvisi melalui PP No. 32 Tahun 2013 tentang Revisi SNP.

Kelahiran peraturan tentang SNP ini merupakan bukti komitmen dari pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan ini dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dalam penyelenggaraan sekolah perlu

berpedoman kepada SNP. SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.19 Tahun 2005 dan PP No. 32 Tahun 2013). Fungsi dari SNP yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Adapun tujuannya untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

SNP terdiri atas delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar ini merupakan satu kesatuan yang harus diterapkan oleh satuan pendidikan agar terjamin mutu penyelenggaraan pendidikan (Sasongko, 2011; Sasongko, 2013; dan Kemdiknas, 2011).

Pendidikan yang bermutu adalah yang sesuai dengan SNP (Burton, 2009). Burton memberikan ilustrasi di Amerika bahwa negara-negara bagian hampir seluruhnya telah sesuai dengan SNP yang ditetapkan pemerintah. Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat tidak ragu-ragu atas pendidikan anak-anaknya dan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan telah benar-benar sesuai dengan kebijakan pemerintah (Sasongko dan Sahono, 2016).

Penerapan SNP merupakan suatu kewajiban (Bandur, 2009). Hal ini didasarkan atas rasional jika SNP tidak

diterapkan di sekolah, maka sekolah tersebut tentu tidak standar. Dampaknya berupa rendahnya prestasi belajar, tingkat kelulusan rendah, sekolah kurang mampu berkompetisi dengan sekolah lain, dan *image* dan *trust* (citra dan kepercayaan) masyarakat terhadap sekolah kurang. Kondisi ini bisa menyebabkan sekolah gulung tikar (Sasongko, 2015; dan Sasongko, 2018).

Penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara pada umumnya belum jelas bagaimana kondisi dan faktor penyebabnya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan tentang seberapa jauh penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah. Unsur-unsur kondisi menyangkut tentang penggambaran penerapan standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Kedelapan standar tersebut perlu digambarkan secara detil di setiap sekolah.

Penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara) belum terungkap bagaimana kondisi data dan informasinya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Permasalahan penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah faktor determinan penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara)?”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor determinan penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Penelitian ini mempunyai kemanfaatan baik secara teoritis maupun

praktis. Manfaat teoritis yaitu dari hasil penelitian ini dapat diperoleh ilmu pengetahuan baru tentang penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah. Penemuan ini dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, terutama manajemen sekolah.

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam pemenuhan SNP, baik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemenuhan terhadap butir SNP, dapat berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, nilai akreditasi sekolah, kemampuan sekolah dalam bersaing dalam skala nasional maupun global, dan kinerja kepala sekolah, guru, staf pendukung, dan pihak lain dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja sekolah.

METODE

Penelitian ini didesain dengan rancangan penelitian deskriptif (Burn, 2009). Penggunaan desain penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran riil tentang kondisi penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijelaskan secara naratif atau deskriptif. Rancangan ini pun masih perlu didekati dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan deskripsi nyata secara mendalam tentang informasi yang berkenaan dengan penerapan SNP, baik pada standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian. Sebaliknya pendekatan kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang penerapan SNP. Melalui analisis kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ini.

Tempat dan lokasi penelitian ini yaitu berbagai jenjang sekolah, baik di SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Lokasi sekolah dipilih sesuai dengan tempat kerja tenaga pengumpul data. Hal itu dikarenakan tenaga pengumpul data terdiri atas kepala sekolah dan guru yang bertugas di ketiga wilayah tersebut.

Subyek penelitian ini terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, komite sekolah, siswa, dan tenaga pendukung lainnya yang ada di sekolah. Jumlah sekolah disesuaikan dengan tenaga pengumpul data. Dengan demikian teknik pengumpulan datanya didasarkan atas incidental sampling (Burn, 2009). Alasan pengambilan subyek ini dikarenakan untuk memberikan gambaran kondisi penerapan SNP sesuai dengan kondisi lapangan.

Teknik pengumpulan data dengan alat ukur pencapaian penerapan SNP (cek list dan angket), wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperdalam perolehan data di lapangan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dari cek list dan angket diperdalam dengan wawancara dan observasi agar memperoleh data kondisi riil di lapangan.

Teknik analisis data terdapat dua jenis. Data kuantitatif berupa angka-angka dari hasil pengumpulan cek list dan angket dianalisis dengan teknik persentase (%) melalui pembagian kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan, dikalikan seratus persen. Persentase ini menggambarkan kondisi pencapaian penerapan SNP dalam konteks keseluruhan. Data yang dihimpun melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan teknik induktif “flow

analysis” (Burn, 2009 dan Miles and Huberman, 2007). Hal itu karena datanya berupa data kualitatif, berupa penjelasan, gambaran penerapan SNP di sekolah dan faktor determinannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah, baik pada jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK menunjukkan tingkat pencapaian penerapan rata-rata di bawah 90%. Terdapat satu sekolah yang memiliki capaian di atas 90% dalam memenuhi SNP. Hal ini berarti bahwa kondisi umumnya sekolah di berbagai jenjang belum standar sesuai dengan kebijakan pemerintah utamanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP dan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Revisi SNP. Lebih dari sepuluh tahun penerapan SNP di sekolah belum mampu dipenuhi secara lengkap.

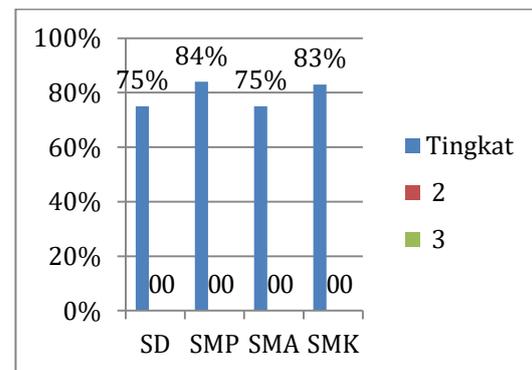
Gambaran pemenuhan SNP dilihat dari jenjang sekolah bervariasi. Di jenjang SD, baik itu sekolah maupun madrasah kondisinya hampir serupa. Rata-rata capaian pemenuhan SNP pada tingkat SD hanya mencapai 75% atau dalam status kurang standar. Kondisi ini berarti masih terdapat 25 % yang perlu dipenuhi di berbagai sekolah. SD Islam Terpadu yang telah terakreditasi A memberikan gambaran pemenuhan SNP yang mendekati SNP. Namun masih juga terdapat beberapa butir yang perlu dipenuhi.

Pada jenjang SMP kondisi penerapan SNP rata-rata sebesar 84%. Kondisi ini berada pada status hampir standar. Masih terdapat 16% lagi yang belum dapat dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SNP belum sesuai dengan ketentuan atau kebijakan pemerintah. Jika dibandingkan dengan capaian pada jenjang SD, maka pada jenjang SMP ini lebih baik dalam penerapan SNP.

Pada jenjang SMA kondisi penerapan SNP rata-rata sebesar 75%. Hal ini berarti berada pada status kurang standar. Masih terdapat 25 % yang belum standar. Pada jenjang SMA ini bisa jadi sasaran studi pada sekolah yang memiliki akreditasi B, sehingga kurang mampu menunjukkan penerapan SNP dengan baik. Kondisi penerapan SNP pada jenjang SMA lebih buruk dibandingkan dengan SMP.

Pada jenjang SMK kondisi penerapan SNP rata-rata sebesar 83%. Kondisi ini berada pada status hampir standar. Masih terdapat 17 % untuk memenuhi ketentuan SNP. Hampir seluruh SMK yang dijadikan sasaran studi kondisi pemenuhan SNP berada pada posisi hampir standar. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada jenjang SMK kondisi penerapan SNP lebih baik dari jenjang SMA.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di atas dapat diilustrasikan pada berbagai jenjang sekolah sebagaimana di bawah ini.



Gambar 1. Tingkat Pencapaian SNP pada Berbagai Jenjang Sekolah

Tingkat pencapaian penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri. Dengan kata lain hal itu merupakan suatu prestasi tersendiri. Pada berbagai jenjang sekolah

hasilnya belum mendekati SNP. Meski tingkat capaiannya kurang menggembirakan, namun ada wujud hasilnya. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian Sasongko (2015), Sasongko dan Sahono (2016) yang juga menunjukkan indikasi sama capaian penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah yang belum mampu mencapai pemenuhan SNP secara lengkap. Demikian pula halnya dengan hasil penelitian Rahmi (2008) dan Teguh (2013) tentang penerapan SNP yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun butir SNP yang terpenuhi secara menyeluruh. Masih terdapat sejumlah butir yang belum dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Kondisi penerapan SNP sebagaimana di atas sesungguhnya erat kaitannya dengan nilai akreditasi sekolah. Gambaran nilai akreditasi sekolah juga memberikan indikasi yang nyata pada tingkat penerapan SNP. Hasil akreditasi sekolah yang berada pada nilai B (Baik) biasanya berada pada kisaran 70-80% pada pemenuhan SNP. Nilai akreditasi A (Baik Sekali) berada pada kisaran pemenuhan 85-95% SNP.

Sekolah memiliki penerapan SNP yang berbeda-beda. Tingkat penerapan SNP di berbagai jenjang sekolah amat tergantung dari manajerial sekolah. Sekolah yang mempunyai kepedulian dan tingkat manajerial serta kepemimpinan yang bagus, maka akan menghasilkan penerapan SNP yang tinggi persentasenya. Namun bagi sekolah yang kurang mempunyai kepedulian serta kepemimpinan yang bagus, maka hasil penerapannya amat kurang. Begitu pula sebaliknya.

Hasil analisis di berbagai jenjang sekolah terdapat dua faktor yang andil dalam mempengaruhi penerapan SNP. Kedua faktor tersebut yakni faktor internal dan eksternal.

Beberapa faktor internal sekolah antara lain yaitu: (1) kepedulian dan peran kepala sekolah dalam penerapan 8 SNP, (2) kepedulian dan peran serta guru dan staf sekolah dalam penerapan 8 SNP, (3) kepemilikan staf sekolah yang bermutu, (4) kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai, dan (5) kepemilikan anggaran sekolah untuk melengkapi 8 SNP.

Terdapat sejumlah faktor eksternal yang amat mempengaruhi antara lain: (1) kepedulian dan peran komite sekolah dan status ekonomi orang tua wali siswa dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah, (2) kebijakan, kepedulian dan peran Dinas Pendidikan atau Kemenag dalam meningkatkan mutu sekolah atau madrasah, (3) keberadaan tokoh masyarakat, lembaga swasta, perusahaan, dan donatur bonafit dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah atau madrasah, (4) kebijakan pendidikan dan status ekonomi dari pemerintah daerah, (5) sumbangan dan donatur dari luar dalam melengkapi keterpenuhan SNP, dan (6) evaluasi eksternal (audit akademik dan manajerial, akreditasi sekolah, dan sebagainya).

Faktor internal dan eksternal yang mempunyai pengaruh dengan penerapan SNP sebagaimana di atas dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Kepedulian dan peran kepala sekolah amat menentukan penerapan 8 SNP. Peran sentral yang amat menentukan adalah kepala sekolah. Peran kepala sekolah amat menentukan penerapan SNP. Bagi kepala sekolah yang mempunyai kepedulian, komitmen, manajerial, taktis, visioner, lincah dan supel menjalin kemitraan; maka mampu memberikan dampak yang positif bagi keterpenuhan SNP. Sebaliknya bagi kepala sekolah yang kurang memenuhi sifat-sifat demikian, maka memberikan hasil yang negatif. Kepala sekolah yang

kurang peduli, acuh tak acuh, dan kurang mendalami persoalan serta tugas dan kewajiban terhadap pengembangan sekolah, akan memberikan dampak terhadap pemenuhan SNP.

Peran serta yang aktif dari guru, staf sekolah dan komite sekolah sebagai tim sekolah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemenuhan SNP. Tim yang mempunyai komitmen dan loyal membantu kepala sekolah dalam memberdayakan kemitraan, mampu memberikan dampak positif bagi penerapan SNP. Sebaliknya bagi sekolah yang kurang mempunyai tim, hanya dikerjakan oleh kepala sekolah saja, ataupun jika timnya kurang peduli dan komit; maka memberikan akibat terhadap ketidakterpenuhan 8 SNP secara penuh.

Kepemilikan staf sekolah yang bermutu amat menentukan terhadap penerapan SNP. Staf sekolah yang terdiri atas guru, staf tata usaha, dan staf pendukung lainnya (keamanan, pembantu umum, penjaga sekolah) yang bermutu baik (komit, peduli, kompeten, profesional, dan loyal terhadap pekerjaan sekolah); akan memberikan dampak positif terhadap penerapan SNP. Sebaliknya, maka akan menghasilkan penerapan SNP yang kurang baik.

Kepemilikan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai juga mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan SNP. Bagi sekolah yang relatif mempunyai kelengkapan sarana prasarana dan anggaran yang memadai akan mampu memenuhi 8 SNP dengan penuh. Sebaliknya sekolah yang mempunyai sarana prasarana dan anggaran yang kurang memadai, maka penerapan SNP kurang baik.

Faktor eksternal seperti (1) kepedulian dan peran komite sekolah dan status ekonomi orang tua wali siswa dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah, (2) kebijakan, kepedulian dan

peran Dinas Pendidikan atau Kemenag dalam meningkatkan mutu sekolah atau madrasah, (3) keberadaan tokoh masyarakat, lembaga swasta, perusahaan, dan donatur bonafit dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah atau madrasah, (4) kebijakan pendidikan dan status ekonomi dari pemerintah daerah, (5) sumbangan dan donatur dari luar dalam melengkapi keterpenuhan SNP, dan (6) evaluasi eksternal (audit akademik dan manajerial, akreditasi sekolah, dan sebagainya).

Kepedulian dan peran komite sekolah serta status ekonomi orang tua wali siswa dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah amat mempengaruhi penerapan dan pemenuhan SNP. Komite dan orang tua siswa yang peduli mempunyai peran yang positif dalam penerapan SNP. Sebaliknya demikian.

Demikian halnya dengan kebijakan, kepedulian dan peran Dinas Pendidikan atau Kemenag dalam meningkatkan mutu sekolah atau madrasah; keberadaan tokoh masyarakat, lembaga swasta, perusahaan, dan donatur bonafit dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah atau madrasah; kebijakan pendidikan dan status ekonomi dari pemerintah daerah; dan sumbangan dan donatur dari luar dalam melengkapi keterpenuhan SNP; mempunyai pengaruh terhadap penerapan SNP. Kebijakan pemerintah, kepedulian institusi luar, dan kontribusi dari pihak luar, akan memberikan pengaruh positif dalam pemenuhan SNP.

Evaluasi eksternal seperti audit akademik dan manajerial, akreditasi sekolah, dan sebagainya; cukup positif dalam penerapan 8 SNP. Sekolah umumnya baru mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga yang dimiliki jika akan diakreditasi. Melalui akreditasi atau evaluasi eksternal, sekolah mempersiapkan segala sesuatu agar

kondisi sekolah menjadi lengkap dan bagus.

Manajemen Berbasis Sekolah yang telah diimplementasikan di sekolah, sesungguhnya merupakan basis mutu yang diberikan wewenang kepada sekolah (BNSP, 2007, dan Akhyar, 2014). Penerapan MBS maupun SNP memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Penerapan SNP sesungguhnya bukan merupakan aspek yang dibebankan kepada pihak sekolah sebagai penanggung jawab utamanya. Banyak pihak yang menentukan dan mempengaruhinya. Misalnya kebijakan Pemerintah Daerah utamanya Dinas Pendidikan kota belum sepenuhnya serius berupaya memenuhi SNP. Hal itu sama halnya dengan penerapan model MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) hingga kini pemerintah belum mengukur keberhasilan efektivitas model ini SASS, 2010; dan Simmon, 2017). MBS belum sepenuhnya diakui efektif mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Burton, 2009). Banyak permasalahan yang muncul ketika MBS diterapkan di sekolah, seperti belum dipahaminya MBS oleh sekolah, dinas pendidikan, penyelenggaraan sekolah asal jalan, bersifat rutinitas, dan kurang adanya kontrol atau pembinaan yang serius.

Hasil penelitian Sasongko, Manap, dan Wachidi (2018); Teguh (2013); dan Ismanto (2018) tentang percepatan pemenuhan SNP juga menunjukkan banyak factor yang mempengaruhi capaian SNP pada berbagai jenjang sekolah. Faktor-faktor tersebut sesungguhnya kepala sekolah dan jajarannya sudah mengerti bagaimana langkah memenuhi SNP ke arah yang lebih baik. Namun karena permasalahan keuangan yang mendukung pemenuhan SNP kurang mencukupi, maka pihak sekolah hanya menunggu nasib kondisinya demikian.

Hal ini perlu penggerakan dari kepala dinas pendidikan atau pemerintah daerah setempat (Sasongko, 2018).

Faktor determinan terhadap penerapan SNP terdiri atas factor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam sekolah seperti kepedulian pimpinan sekolah merupakan hal yang utama (Cahyono, Budiwowoho, dan Muwarni, 2015; dan Kontoghiorges and Bembeck, 2018). Demikian pula factor eksternal yang berupa dukungan dari masyarakat dan pemerintah, kadang mereka kurang peduli (Tumbel, Tumbel, and Paledeng, 2016; dan Sasongko, 2018). Kesemua determinan yang menentukan capaian penerapan SNP amat penting dipedulikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di berbagai jenjang sekolah di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara memiliki capaian yang berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu amat tergantung dari sumber daya dan potensi sekolah yang dimiliki. Pada umumnya hampir semua sekolah belum mampu menerapkan SNP dengan efektif. Hal itu ditentukan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kepedulian warga sekolah, ketersediaan sumber daya, dan ketersediaan anggaran. Faktor eksternal seperti dukungan komite sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan donator.

Saran kepada kepala sekolah, guru, staf pendukung, komite sekolah diharapkan dalam menyusun rencana kerja sekolah agar capaian penerapan SNP dapat diprioritaskan. Agar SNP dapat dipenuhi secara lengkap, maka perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan SNP. Faktor internal sekolah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yaitu: (1)

kepedulian dan peran kepala sekolah dalam penerapan 8 SNP, (2) kepedulian dan peran serta guru dan staf sekolah dalam penerapan 8 SNP, (3) kepemilikan staf sekolah yang bermutu, (4) kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai, dan (5) kepemilikan anggaran sekolah untuk melengkapi 8 SNP. Faktor eksternal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu: (1) kepedulian dan peran komite sekolah dan status ekonomi orang tua wali siswa dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah, (2) kebijakan, kepedulian dan peran gubernur, wali kota, dan bupati, kepala dinas pendidikan atau kemenag dalam meningkatkan mutu sekolah atau madrasah, (3) keberadaan tokoh masyarakat, lembaga swasta, perusahaan, dan donatur bonafit dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah atau madrasah, (4) kebijakan pendidikan dan status ekonomi dari pemerintah daerah, (5) sumbangan dan donatur dari luar dalam melengkapi keterpenuhan SNP, dan (6) evaluasi eksternal (audit akademik dan manajerial, akreditasi sekolah, dan sebagainya) secara periodik dan terukur.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhyar, Y. (2014). Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu). *Jurnal Potensia*. 13 (1) 45-52
- Bandur, Agustinus. (2009). The Implementation of School Based Management in Indonesia: Creating Conflict in Regional Level. *Journal of NTT Studies*, Vol. 1, No. 1, 16-27
- Burn, Robert B. (2009). *Research Methods: Action Research*. Sidney: Longman
- Burton, Paul. (2009). *National Education Standards: Getting Beneath the Surface*. New Jersey: Policy Information Center.
- <https://www.ets.org/Media/Research/pdf/PICNATEDSTAND.pdf> (Diunduh 2 Maret 2016)
- BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). (2007). *Standar Nasional Pendidikan (Buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)*. Jakarta
- Cahyono, EL; Budiwibowo, S; dan Murwani, J. (2015). Analisis Penerapan 8 SNP di SMPN 2 Kabupaten Madiun. *ASSETS: Jurnal Akutansi dan Pendidikan*, 4 (2), 99-105
- Ismanto, B. (2018). Kondisi Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Profesi Pendidik*, 5 (1), 100-113
- Goldberg, J and Cole, BR. (2018). Quality Management in Education: Building and Equity in Student Performance. *Quality Management Journal*, 9 (4), 8-22. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10686967.2002.11919033>
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Materi Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
- Kontoghiorghes, C. and Dembeck, D. (2018). Priotizing Quality Management and Sociatechnical Vaariabel in Terms of Quality Performance, *Quality Management Journal*, 8 (3), 36-48. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10686967.2001.11918965>
- Miles, MS and Huberman, AM. (2007). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. <http://www.ed.gov/databased/qualidata.Ed54673534> (Diunduh 3 Mei 2012)

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sasongko, Rambat Nur. (2011). Model Manajemen Pendidikan Berbasis Solusi Untuk Mengatasi Sekolah Miskin. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan*. Vol. 41, No. 2, November 2011, Hal. 127-134
- Sasongko, Rambat Nur. (2013). Strategi Mengatasi Sekolah Miskin Melalui Pengembangan Model MSBK di Beberapa Kabupaten Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajer Pendidikan*, Vol.8, No.4, Oktober 2013, 1-9
- Sasongko, Rambat Nur. (2015). Strategi Mengatasi Madrasah Miskin Melalui Pengembangan Model Manajemen Berbasis Kolaborasi (Penelitian Tindakan Kependidikan di Berbagai Jenjang Madrasah Provinsi Bengkulu). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 19, No.2, Desember 2015. Hal. 185-194
- Sasongko, Rambat Nur. (2018). The Implementation of National Standards of Education for School Quality Improvement Facing the 21st Century (Descriptive Evaluative Studies in Various Levels of Schools in Bengkulu Province of Indonesia). *International Journal of Current Research in Life Sciences*. 07 (08), 2647-2651
- Sasongko, Rambat Nur. (2018). The Application of the National Higher Education Standards (NHES) for Quality Improvement of World Class Graduates. *EPH - International Journal of Educational Research*, 2 (12), 12-19
- Sasongko, Rambat Nur dan Sahono, Bambang. (2016). *Desain Inovasi Manajemen Sekolah*. Jakarta: Shany Publisher
- Sasongko, Rambat Nur; Manap, S; and Wachidi. (2018). The New Challenges of Implementation of School Principals Standards in the Era of Asean Economic Communities (AEC). *International Journal of Recent Scientific Research*. 9 (9A), 28733-28736
- SASS (School and Staffing Survey). 2010. *School Quality, School Management, and Teacher Quality*. <http://nces.ed.gov/surveys/sass/issues2.asp>
- Simmon, R. (2017). "Quality-I is Safety-II: The Integration of Two Management Systems." *Quality Management Journal*, 24 (2), 55-56. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09535217.2017.1375000>
- Teguh, Triwiyanto. (2013). Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 19. No. 2. <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/4208> (Diunduh 2 April 2026)

Tumbel, CM; Tumbel AL; and Paladeng, ID. (2016). Implementation of Quality Management System to Improve The Operational Performance of Credit Union (Study of Glaistygil Credit Union Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (3), 14-26,<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download>